

Peran Konselor Sekolah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Siswa melalui Budaya Sekolah yang Inklusif dan Aman

Hamimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan, Indonesia

hamimahmia8@gmail.com

Diserahkan tanggal 17 Mei 2026 | Diterima tanggal 23 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 22 Juli 2026

Abstract:

An inclusive and safe school culture is a fundamental basis for students' academic success and emotional well-being, and school counselors occupy a strategic position in building it. This study analyses how school counselors integrate values of diversity, create a psychologically safe environment, and design guidance and counseling services that support students' psychological well-being. A qualitative descriptive single-case study was conducted at a private vocational senior secondary school in East Java. Informants comprised the principal, the school counselor, and students, selected purposively so that the three occupy distinct positions in the service chain, namely policy, delivery, and reception. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analysed using the Miles, Huberman, and Saldaña model and verified through source and technique triangulation. The findings show that the counselor's role operates on four levels of target, namely individual, group, organisational, and systemic, and that these levels are not parallel but cumulative. Mapping the findings against the four dimensions of psychological well-being adopted in this study shows that three dimensions are supported by field evidence while the dimension of purposeful living remains asserted rather than evidenced. The study concludes that the counselor functions as an agent of change across all four levels.

Keywords: school counselor; psychological well-being; inclusive culture; safe school; guidance and counseling.

Abstrak :

Budaya sekolah yang inklusif dan aman merupakan fondasi keberhasilan akademik dan kesejahteraan emosional siswa, dan konselor sekolah menempati posisi strategis dalam membangunnya. Penelitian ini menganalisis bagaimana konselor sekolah mengintegrasikan nilai keberagaman, menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, dan merancang layanan bimbingan dan konseling yang mendukung kesejahteraan psikologis siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal deskriptif pada sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Timur. Informan terdiri atas kepala sekolah, konselor, dan siswa yang dipilih secara purposif sehingga ketiganya menempati kedudukan berbeda dalam rantai layanan, yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan penerimaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terbuka, observasi partisipasi pasif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan peran konselor bekerja pada empat tingkat sasaran, yaitu individu, kelompok, organisasi, dan sistem, dan keempat tingkat itu bersifat kumulatif alih-alih sejajar. Pemetaan temuan terhadap empat dimensi kesejahteraan psikologis yang dipakai penelitian ini menunjukkan tiga dimensi didukung bukti lapangan, sedangkan dimensi tujuan hidup yang bermakna masih berupa pernyataan. Budaya sekolah yang inklusif dan aman terbukti mendukung kesejahteraan psikologis siswa, dengan konselor berfungsi sebagai agen perubahan pada keempat tingkat tersebut.

Kata Kunci: konselor sekolah; kesejahteraan psikologis; budaya inklusif; sekolah aman; bimbingan dan konseling.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal, baik pada aspek intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Sekolah karena itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemindahan pengetahuan, melainkan juga sebagai lingkungan yang menopang perkembangan psikologis siswa. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis yang dimiliki peserta didik. Deviana dkk. (2023) merumuskan kesejahteraan psikologis sebagai kondisi individu yang mampu menerima dirinya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu mengembangkan potensi diri, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Keempat dimensi itulah yang dipakai penelitian ini sebagai kerangka penilaian, dan Jibeen dan Khalid (2010) menambahkan kemandirian serta kemampuan mengendalikan diri sebagai penyerta.

Kondisi nyata di lingkungan sekolah menunjukkan banyak siswa masih menghadapi permasalahan psikologis, sosial, dan akademik. Perundungan, diskriminasi, konflik antarsiswa, tekanan akademik, persoalan keluarga, serta pengaruh media sosial merupakan tantangan yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Bilqis dkk. (2019) menemukan bentuk perundungan yang paling sering terjadi di sekolah adalah perundungan verbal dan psikologis, yang berdampak pada menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, serta ketidaknyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi ini menuntut sekolah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan mental peserta didik.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah penciptaan budaya sekolah yang inklusif dan aman. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kondisi fisik dan psikologis. Yuliawanti (2021) menyatakan budaya inklusif dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman serta mendorong seluruh warga sekolah bekerja sama mendukung perkembangan setiap siswa, sedangkan Ummah dkk. (2024) mengidentifikasi faktor-faktor pendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif pada konteks Indonesia. Selain inklusivitas, keamanan psikologis merupakan prasyarat tersendiri. Boyle dkk. (2020) menjelaskan iklim sekolah yang positif dan hubungan yang baik antara guru dan siswa berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan pendidikan inklusif sekaligus terhadap perkembangan kesejahteraan psikologis siswa.

Dalam mewujudkan budaya tersebut, konselor sekolah memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, advokat, dan agen perubahan. American School Counselor Association (2020) menempatkan peran konselor pada tiga ranah perkembangan, yaitu akademik, karier, serta sosial dan emosional, dan Mayes dkk. (2018) memperluasnya dengan menempatkan konselor sebagai pemimpin dalam perbaikan sekolah. Purnamasari dkk. (2024) menyatakan layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berfungsi kuratif, tetapi juga preventif dan developmental, sedangkan Irmayanti dan Yuliani (2020) memerinci bentuknya pada sekolah inklusif dan Nelson dkk. (2021) menawarkan model proses konseling individu. Pada konteks inklusif, konselor dituntut memiliki kompetensi multikultural (Rahmi dkk., 2022; Zulfa, 2021; Baires dkk., 2023), dan keberhasilannya bergantung pada kemitraan antarpihak (Yildiz, 2021).

Meskipun peran konselor telah banyak dibahas, terdapat tiga celah pada literatur yang ada. Pertama, kajian mengenai peran konselor dalam membangun budaya inklusif dan aman umumnya menyajikan peran tersebut sebagai daftar layanan, belum sebagai susunan yang menunjukkan tingkat sasaran dan hubungan antartingkat, sebagaimana tampak pula pada Insani dan Atuti (2024) yang mengkaji tema serupa. Kedua, kajian yang menghubungkan peran konselor dengan kesejahteraan psikologis jarang menguji temuan lapangan terhadap dimensi kesejahteraan psikologis yang dipakainya sendiri, sehingga tidak diketahui dimensi mana yang benar-benar terbukti dan dimensi mana yang baru dinyatakan. Ketiga, penelitian pada jenjang sekolah menengah kejuruan masih terbatas dibandingkan jenjang pendidikan dasar dan menengah umum, padahal karakteristik peserta didik dan tuntutan kariernya berbeda.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana konselor sekolah mengintegrasikan nilai keberagaman, menciptakan lingkungan aman, dan merancang layanan bimbingan dan konseling yang mendukung kesejahteraan psikologis siswa; dan (2) bagaimana peran tersebut tersusun menurut tingkat sasaran, serta dimensi kesejahteraan psikologis mana yang didukung bukti lapangan. Kebaruannya terletak pada dua langkah analisis yang jarang ditempuh kajian sejenis, yaitu pemetaan peran konselor menurut tingkat sasaran dan pengujian temuan terhadap dimensi kesejahteraan psikologis yang diadopsi penelitian, sehingga klaim mengenai peningkatan kesejahteraan dapat dinilai kelengkapannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena secara komprehensif dan kontekstual sesuai kondisi alamiah di lapangan, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara holistik peran konselor sekolah dalam mendampingi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa melalui pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan aman pada satu konteks yang spesifik.

Penelitian dilaksanakan di sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Timur pada [rentang waktu pengumpulan data]. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan purposif bahwa sekolah tersebut menerapkan konsep pendidikan inklusif dan aktif mengembangkan iklim sekolah yang aman serta ramah terhadap keberagaman peserta didik. Untuk keperluan telaah anonim, nama sekolah tidak dicantumkan dalam naskah ini. Subjek dan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan ketiga kategori informan tidak dimaksudkan sebagai penambahan jumlah sumber, melainkan sebagai penempatan tiga kedudukan berbeda dalam rantai layanan, yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan penerimaan, sehingga keterangan pada satu kedudukan dapat diuji terhadap kedudukan lainnya. Profil informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian menurut Kedudukan dalam Rantai Layanan

Kode informan	Kedudukan	Posisi dalam rantai layanan	Jenis data yang digali
Informan 1	Kepala Sekolah	Kebijakan	Kebijakan sekolah, dukungan fasilitas, dan strategi kepemimpinan dalam mewujudkan budaya inklusif dan aman
Informan 2	Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling	Pelaksanaan	Asesmen kebutuhan, perancangan program, layanan konseling individu dan kelompok, serta kolaborasi antarprofesi
Informan 3	Siswa	Penerimaan	Pengalaman langsung, tingkat kenyamanan, dan dampak budaya inklusif serta aman yang dirasakan

Sumber: data penelitian, diolah. Identitas informan dan nama sekolah tidak dicantumkan sesuai keperluan telaah anonim dan prinsip etika penelitian. [Catatan untuk penulis: mohon lengkapi jumlah informan pada setiap kategori, khususnya kategori siswa, karena jumlah tersebut menentukan kekuatan triangulasi sumber.]

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan pedoman berstruktur terbuka untuk menggali pelaksanaan asesmen kebutuhan, program pencegahan perundungan, layanan konseling, serta dinamika kolaborasi antarpihak. Observasi partisipasi pasif dilakukan terhadap interaksi sosial siswa, dinamika bimbingan di ruang bimbingan dan konseling, iklim inklusivitas di kelas, serta kondisi keamanan psikologis dan fisik lingkungan sekolah. Studi dokumentasi mencakup rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, catatan asesmen kebutuhan siswa, agenda program antiperundungan, rekam jejak kegiatan inklusif, dan dokumen profil sekolah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan memilah dan mengategorikan data mentah sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif serta tabel pemetaan peran dan matriks hubungan antartema, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang diperiksa kembali terhadap bukti lapangan hingga konsisten.

Selain ketiga tahap tersebut, penelitian ini menambahkan dua langkah analisis. Pertama, pemetaan setiap peran konselor yang ditemukan menurut tingkat sasarannya, yaitu individu, kelompok, organisasi, atau sistem, disertai penilaian atas jenis bukti yang menopangnya. Kedua, pengujian temuan terhadap keempat dimensi kesejahteraan psikologis yang diadopsi penelitian ini, untuk mengetahui dimensi mana yang didukung bukti lapangan dan dimensi mana yang baru berupa pernyataan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan kepala sekolah, konselor, dan siswa; serta triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil wawancara terhadap bukti observasi dan dokumen program bimbingan dan konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun dalam dua lapis. Lapis pertama menyajikan temuan pada empat aspek, yaitu asesmen kebutuhan dan pengembangan program, pembangunan budaya inklusif, penciptaan lingkungan aman, serta kolaborasi antarpihak. Lapis kedua membahas temuan tersebut melalui pemetaan tingkat sasaran, pengujian terhadap dimensi kesejahteraan psikologis, dan penelaahan kolaborasi sebagai penopang sistem. Temuan diposisikan sebagai gambaran kontekstual pada satu sekolah, bukan generalisasi terhadap sekolah menengah kejuruan pada umumnya.

Hasil: Asesmen Kebutuhan dan Pengembangan Program Layanan

Konselor melakukan identifikasi kebutuhan siswa sebagai langkah awal penyusunan program layanan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, konsultasi dengan guru, serta komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui kondisi akademik, sosial, emosional, dan psikologis siswa. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penentuan bentuk layanan yang sesuai bagi masing-masing siswa.

Berdasarkan hasil asesmen, konselor mengembangkan program bimbingan dan konseling yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Layanan responsif diberikan kepada siswa yang menghadapi masalah pribadi, sosial, maupun akademik. Layanan perencanaan individual membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut dan perencanaan karier. Dukungan sistem dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan tenaga profesional lain seperti psikolog, terapis, dan psikiater.

Hasil: Pembangunan Budaya Sekolah yang Inklusif

Dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif, konselor menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan sikap saling menghormati melalui kegiatan bimbingan klasikal serta pendidikan multikultural. Konselor juga melakukan advokasi terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus agar memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan siswa lainnya. Bentuk advokasi ini menempatkan konselor bukan hanya sebagai pemberi layanan, melainkan juga sebagai pihak yang menyuarakan kepentingan siswa di hadapan struktur sekolah.

Hasil: Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Aman

Konselor berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman melalui program pencegahan perundungan, penyediaan ruang aman, serta layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah psikologis maupun sosial. Upaya tersebut membantu siswa merasa nyaman, terlindungi, dan memiliki tempat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. [Catatan untuk penulis: mohon perinci bentuk program pencegahan perundungan yang dijalankan, bentuk

dan letak ruang aman, serta mekanisme pelaporan yang tersedia bagi siswa. Tanpa perincian ini, temuan tidak dapat dibedakan dari praktik umum di sekolah mana pun.]

Hasil: Kolaborasi Antarpihak

Keberhasilan pelaksanaan program didukung kolaborasi antara konselor, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama tersebut memungkinkan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan aman, serta memungkinkan kebutuhan siswa diidentifikasi dan ditangani secara lebih menyeluruh. Kolaborasi juga membantu menciptakan konsistensi dukungan bagi siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Rekapitulasi keempat aspek temuan beserta tingkat sasaran dan jenis bukti yang menopangnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Peran Konselor menurut Tingkat Sasaran

Tingkat sasaran	Bentuk peran yang ditemukan	Jenis bukti pendukung	Kekuatan bukti
Individu	Asesmen kebutuhan per siswa; konseling individu; layanan responsif; perencanaan individual studi lanjut dan asesmen karier	Wawancara, dokumen rencana layanan dan catatan	Kuat
Kelompok	Konseling kelompok; bimbingan klasikal; pendidikan multikultural	Wawancara, observasi kegiatan bimbingan	Sedang
Organisasi	Program pencegahan perundungan; penyediaan ruang aman; advokasi siswa berkebutuhan khusus	Wawancara, agenda program, observasi lingkungan sekolah	Sedang; bentuk program belum diperinci
Sistem	Kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua; rujukan kepada psikolog, terapis, dan psikiater	Wawancara ketiga kategori informan	Sedang; mekanisme rujukan belum diuraikan

Sumber: hasil analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi, diolah. Tingkat sasaran disusun dari yang paling sempit jangkauannya menuju yang paling luas.

Pembahasan: Peran Konselor Bersifat Kumulatif, Bukan Sejajar

Temuan penelitian lazim disajikan sebagai daftar peran yang berdiri berdampingan. Penelaahan menurut tingkat sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 2 menunjukkan keempat tingkat tersebut sesungguhnya bersifat kumulatif. Layanan pada tingkat individu menangani siswa yang telah mengalami masalah; layanan pada tingkat kelompok menjangkau siswa sebelum masalah muncul; tindakan pada tingkat organisasi mengubah lingkungan yang menghasilkan masalah; sedangkan tindakan pada tingkat sistem menjamin ketiga tingkat sebelumnya memperoleh dukungan sumber daya dan kewenangan. Semakin tinggi tingkat sasaran, semakin luas jangkauannya, namun semakin bergantung pada dukungan pihak di luar konselor.

Pembedaan ini berkonsekuensi praktis. Apabila keempat tingkat diperlakukan sejajar, sekolah dapat menyimpulkan bahwa banyaknya layanan konseling individu merupakan tanda keberhasilan, padahal tingginya kebutuhan layanan kuratif justru dapat menunjukkan lemahnya tindakan pada tingkat organisasi. Apabila keempatnya dipahami kumulatif, ukuran keberhasilan bergeser: keberhasilan tingkat organisasi tampak pada menurunnya kebutuhan layanan pada tingkat individu. Perumusan ini sejalan dengan Purnamasari dkk. (2024) yang menempatkan fungsi preventif dan developmental setara dengan fungsi kuratif, serta dengan Mayes dkk. (2018) yang menempatkan konselor sebagai pemimpin perubahan dan bukan semata penyedia layanan.

Penempatan advokasi juga perlu dicatat. Pada temuan penelitian ini, advokasi terhadap siswa berkebutuhan khusus berada pada tingkat organisasi karena sasarannya adalah keputusan dan kebijakan sekolah, bukan perilaku siswa. Irmayanti dan Yuliani (2020) memerinci layanan

bimbingan dan konseling pada sekolah inklusif, dan Insani serta Atuti (2024) mengkaji peran konselor dalam membangun budaya inklusif dan aman; keduanya menempatkan advokasi sebagai bagian layanan. Penelitian ini menambahkan bahwa advokasi menuntut jenis kewenangan yang berbeda dari layanan konseling, sehingga keberhasilannya tidak dapat dinilai dengan ukuran yang sama.

Pembahasan: Tiga dari Empat Dimensi Kesejahteraan Psikologis Terbukti

Penelitian ini mengadopsi empat dimensi kesejahteraan psikologis dari Deviana dkk. (2023), yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, pengembangan potensi diri, dan tujuan hidup yang jelas serta bermakna. Pengujian temuan lapangan terhadap keempat dimensi tersebut menghasilkan temuan yang menjadi kontribusi analitis utama penelitian ini, dan hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Temuan terhadap Dimensi Kesejahteraan Psikologis Siswa

Dimensi	Temuan lapangan yang bersesuaian	Status bukti
Penerimaan diri	Rasa diterima dan dihargai pada lingkungan yang menghargai keberagaman; berkurangnya perlakuan diskriminatif	Didukung bukti
Hubungan positif dengan orang lain	Meningkatnya kemampuan berinteraksi sosial; mediasi konflik antarsiswa; berkurangnya perundungan	Didukung bukti
Pengembangan potensi diri	Layanan perencanaan individual; advokasi kesempatan belajar yang setara bagi siswa berkebutuhan khusus	Didukung bukti
Tujuan hidup yang jelas dan bermakna	Disebut dengan merujuk literatur; layanan perencanaan studi lanjut dan karier tersedia, namun dampaknya terhadap kejelasan tujuan hidup siswa belum tergal	Belum didukung bukti tersendiri

Sumber: analisis penulis atas temuan lapangan terhadap dimensi kesejahteraan psikologis menurut Deviana dkk. (2023). Status bukti menunjukkan ketersediaan bukti dalam data penelitian, bukan penilaian atas ada atau tidaknya praktik di sekolah.

Tiga dimensi pertama didukung bukti lapangan. Penerimaan diri ditopang keterangan mengenai rasa diterima dan dihargai yang muncul pada lingkungan yang menghargai keberagaman. Hubungan positif ditopang temuan mengenai meningkatnya kemampuan berinteraksi sosial serta berkurangnya konflik antarsiswa. Pengembangan potensi ditopang temuan mengenai layanan perencanaan individual dan advokasi kesempatan belajar yang setara. Sebaliknya, dimensi keempat, yaitu tujuan hidup yang jelas dan bermakna, tidak ditopang bukti lapangan tersendiri. Dimensi ini disebut dalam naskah dengan merujuk Jibeen dan Khalid (2010), namun tidak disertai temuan yang menunjukkan bagaimana layanan konselor membantu siswa merumuskan tujuan hidupnya.

Ketidaklengkapan ini bermakna dan tidak perlu ditutup. Pada jenjang sekolah menengah kejuruan, dimensi tujuan hidup sesungguhnya paling dekat dengan layanan perencanaan karier, dan naskah memang melaporkan keberadaan layanan perencanaan individual untuk pilihan studi lanjut dan karier. Yang belum tersedia adalah bukti bahwa layanan tersebut berdampak pada kejelasan tujuan hidup siswa, bukan hanya pada ketersediaan informasi pilihan. Hanimoğlu (2018) menunjukkan persepsi siswa mengenai peran konselor dalam pemilihan karier merupakan hal yang dapat diteliti tersendiri, dan Nidaurohmah (2025) memerinci peran konselor dalam membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Dengan demikian, celah ini justru menunjuk arah penelitian lanjutan yang spesifik dan relevan bagi jenjang kejuruan.

Perlu ditegaskan bahwa ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan praktik. Sangat mungkin konselor memang membantu siswa merumuskan tujuan hidup, namun hal itu tidak tergal dalam pengumpulan data karena panduan wawancara tidak mengarah ke sana. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa klaim peningkatan kesejahteraan psikologis pada penelitian ini berlaku untuk tiga dimensi, dan penyempitan klaim semacam ini menguatkan naskah alih-alih melemahkannya.

Pembahasan: Kolaborasi sebagai Penopang Tingkat Sistem

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan psikologis siswa tidak dapat dicapai konselor secara mandiri. Temuan penelitian menunjukkan kolaborasi antara konselor, kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional lain menjadi faktor pendukung utama. Temuan ini sejalan dengan Yildiz (2021) yang menempatkan kemitraan antarpihak sebagai prasyarat keberhasilan pendidikan inklusif, serta dengan Ummah dkk. (2024) yang mengidentifikasi dukungan lingkungan kelembagaan sebagai faktor pendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

Ditinjau melalui kerangka tingkat sasaran, kolaborasi menempati kedudukan khusus. Ia bukan salah satu layanan di antara layanan lain, melainkan penopang yang memungkinkan ketiga tingkat sebelumnya berjalan. Tanpa kesediaan kepala sekolah, tindakan pada tingkat organisasi tidak memiliki kewenangan; tanpa keterlibatan guru, tindakan pada tingkat kelompok tidak menjangkau ruang kelas; tanpa komunikasi dengan orang tua, dukungan bagi siswa terputus ketika ia pulang. Kolaborasi karena itu tidak dapat diukur dari keberadaan pertemuan, melainkan dari kesinambungan dukungan yang dirasakan siswa pada kedua lingkungan tersebut.

Konteks inklusif juga menuntut kesiapan yang bersifat lintas budaya. Rahmi dkk. (2022) menempatkan kompetensi multikultural sebagai syarat layanan yang objektif dan tidak diskriminatif, Zulfa (2021) menempatkannya dalam kerangka kode etik konseling, dan Baires dkk. (2023) menunjukkan kepekaan budaya perlu terwujud dalam cara layanan disampaikan dan bukan hanya dalam sikap batin pemberi layanan. Ketiga rujukan itu menunjuk satu implikasi yang sama, yaitu bahwa penguatan kompetensi konselor merupakan bagian dari penguatan tingkat sistem, bukan urusan pengembangan diri perorangan.

Pembahasan: Asesmen Kebutuhan sebagai Titik Tumpu Seluruh Rangkaian

Di antara keempat aspek temuan, asesmen kebutuhan menempati kedudukan yang paling menentukan meskipun paling tidak tampak. Seluruh bentuk layanan pada tingkat berikutnya bergantung pada ketepatan asesmen: program bimbingan klasikal hanya relevan apabila tema yang diangkat memang kebutuhan siswa, program pencegahan perundungan hanya tepat sasaran apabila bentuk perundungan yang dominan telah dikenali, dan advokasi hanya beralasan apabila hambatan yang dialami siswa berkebutuhan khusus telah teridentifikasi. Tere (2021) menempatkan asesmen kebutuhan sebagai dasar perencanaan program bimbingan, dan temuan penelitian ini memperkuat kedudukan itu dengan menunjukkan bahwa asesmen bukan tahap awal yang selesai, melainkan penopang yang menentukan mutu seluruh rangkaian.

Konsekuensi praktisnya menyangkut prioritas penguatan. Ketika layanan dinilai belum efektif, kecenderungan yang lazim adalah menambah jenis layanan. Kerangka ini menunjukkan langkah yang lebih tepat adalah memeriksa mutu asesmen terlebih dahulu, karena layanan yang bertambah di atas asesmen yang lemah hanya memperbanyak kegiatan tanpa menambah ketepatan sasaran. Pada penelitian ini, keberadaan dokumen catatan asesmen kebutuhan merupakan bukti terkuat yang tersedia, dan itulah sebabnya tingkat individu memperoleh penilaian kekuatan bukti tertinggi pada Tabel 2.

Pembahasan: Keamanan Psikologis sebagai Prasyarat, bukan Hasil

Naskah lazim menempatkan keamanan psikologis sebagai salah satu capaian budaya sekolah yang inklusif. Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan yang berlangsung dua arah dan bahkan mendahului. Siswa hanya bersedia memanfaatkan layanan konseling apabila ia lebih dahulu merasa aman, dan tanpa kesediaan itu asesmen kebutuhan pun kehilangan sumber datanya. Dengan demikian keamanan psikologis berkedudukan sebagai prasyarat masuknya siswa ke dalam seluruh rangkaian layanan, bukan semata hasil akhir yang diharapkan darinya. Boyle dkk. (2020) menempatkan iklim sekolah dan mutu hubungan guru dengan siswa sebagai penentu keberhasilan pendidikan inklusif, dan pembacaan ini sejalan dengan temuan tersebut.

Penyediaan ruang aman karena itu tidak dapat dinilai dari ketersediaan tempatnya, melainkan dari kesediaan siswa menggunakannya. Ukuran yang lebih tepat adalah jumlah siswa yang datang atas kemauan sendiri dibandingkan jumlah siswa yang datang karena dipanggil atau dilaporkan. Perbedaan kedua angka itu merupakan penanda kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang membedakan ruang bimbingan dan konseling sebagai tempat perlindungan dari ruang bimbingan dan konseling sebagai tempat penanganan pelanggaran. Data penelitian ini belum mencakup perbedaan tersebut, dan hal itu dicatat sebagai arah pengumpulan data pada penelitian lanjutan.

Pembahasan: Implikasi bagi Penguatan Layanan pada Jenjang Kejuruan

Jenjang sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik yang membedakan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling dari jenjang menengah umum. Peserta didik berada pada masa peralihan yang lebih dekat ke dunia kerja, sehingga persoalan yang dibawa ke ruang bimbingan tidak hanya menyangkut relasi sebaya dan tekanan akademik, tetapi juga kecemasan mengenai penempatan kerja, kesiapan praktik industri, dan pilihan antara bekerja atau melanjutkan studi. Nidaurrohman (2025) memerinci peran konselor dalam membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut, dan Hanımoğlu (2018) menunjukkan persepsi siswa mengenai peran konselor pada pemilihan karier merupakan hal yang dapat diteliti tersendiri. Temuan penelitian ini menempatkan layanan perencanaan individual sebagai bagian tingkat individu, namun pada jenjang kejuruan layanan tersebut sesungguhnya berpotensi menjangkau tingkat sistem karena menuntut kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Konsekuensi praktisnya menyangkut cakupan kolaborasi. Pada temuan penelitian ini, kemitraan yang dilaporkan meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional bidang kesehatan jiwa. Belum tampak kemitraan dengan pemberi kerja atau lembaga pelatihan, padahal justru kemitraan itulah yang paling berkaitan dengan dimensi tujuan hidup pada jenjang kejuruan. Penambahan mitra semacam ini merupakan penguatan tingkat sistem yang sekaligus berpotensi menutup celah bukti pada dimensi keempat kesejahteraan psikologis, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

Batas Keberlakuan Kesimpulan

Lima keterbatasan membatasi generalisasi temuan penelitian ini. Pertama, penelitian dilaksanakan pada satu sekolah menengah kejuruan swasta, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan pada jenjang, status, maupun konteks wilayah yang berbeda. Kedua, jumlah informan pada masing-masing kategori belum diuraikan, sehingga kekuatan triangulasi sumber belum dapat dinilai pembaca. Ketiga, penelitian tidak mengukur kesejahteraan psikologis siswa dengan instrumen baku, sehingga pernyataan mengenai peningkatan bersandar pada persepsi informan dan pengamatan peneliti, bukan pada perubahan skor yang terukur. Keempat, penelitian tidak menyertakan perbandingan sebelum dan sesudah, sehingga hubungan sebab akibat antara layanan konselor dan kesejahteraan psikologis belum dapat ditegakkan. Kelima, dimensi tujuan hidup yang bermakna tidak tergal dalam pengumpulan data, sehingga penilaian atas dimensi tersebut tertunda.

Dengan mempertimbangkan kelima keterbatasan tersebut, kesimpulan yang dapat dipertahankan adalah bahwa konselor sekolah menjalankan peran pada empat tingkat sasaran yang bersifat kumulatif, dan bahwa budaya sekolah yang inklusif dan aman terkait dengan tiga dari empat dimensi kesejahteraan psikologis siswa berdasarkan bukti yang tersedia. Klaim mengenai besaran peningkatan kesejahteraan psikologis dan mengenai hubungan sebab akibat tidak dapat ditarik dari data penelitian ini.

SIMPULAN

Konselor sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa melalui pengembangan budaya sekolah yang inklusif dan aman. Peran tersebut diwujudkan melalui identifikasi kebutuhan siswa, penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, layanan konseling individu maupun kelompok, pencegahan perundungan, advokasi bagi siswa berkebutuhan khusus, serta kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional lain.

Menjawab pertanyaan kedua penelitian, peran tersebut tersusun pada empat tingkat sasaran yang bersifat kumulatif, yaitu individu, kelompok, organisasi, dan sistem. Semakin tinggi tingkat sasaran, semakin luas jangkauannya namun semakin bergantung pada dukungan pihak di luar konselor, sehingga kolaborasi berkedudukan sebagai penopang seluruh rangkaian dan bukan sebagai satu layanan di antara layanan lain. Pengujian temuan terhadap empat dimensi kesejahteraan psikologis yang diadopsi penelitian ini menunjukkan tiga dimensi didukung bukti lapangan, yaitu penerimaan diri, hubungan positif, dan pengembangan potensi, sedangkan dimensi tujuan hidup yang jelas dan bermakna belum ditopang bukti tersendiri meskipun jenjang kejuruan justru menyediakan pintu masuk yang paling dekat melalui layanan perencanaan karier.

Implikasi praktisnya adalah bahwa penguatan layanan bimbingan dan konseling sebaiknya tidak diukur dari banyaknya layanan kuratif, melainkan dari kemampuan tindakan pada tingkat organisasi dan sistem menurunkan kebutuhan layanan tersebut. Penguatan kompetensi konselor dalam pendidikan inklusif, konseling multikultural, dan kesehatan mental karena itu perlu ditempatkan sebagai kebijakan sekolah, bukan sebagai pengembangan diri perorangan. Penelitian lanjutan disarankan menggali dimensi tujuan hidup secara khusus melalui layanan perencanaan karier, menggunakan instrumen kesejahteraan psikologis yang baku, serta memperluas informan pada kategori siswa agar suara penerima manfaat layanan lebih terwakili.

DAFTAR PUSTAKA

- American School Counselor Association. (2020). ASCA position statements. <https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements>
- Baires, N. A., Cañón, L. F., García-Zambrano, S., Guerrero-Wickham, P., & Castro-Hostetler, M. (2023). A contextual behavioral framework for enhancing cultural responsiveness in behavioral service delivery for Latino families. *Behavior Analysis in Practice*, 16(4), 938–962. <https://doi.org/10.1007/s40617-023-00788-y>
- Bilqis, F., Karina, T., & Latipah, I. C. (2019). Literature review: Peran konselor dalam mewujudkan sekolah aman dan damai bagi siswa. *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(3), 115–117. <https://doi.org/10.26539/teraputik.23112>
- Boyle, C., Anderson, J., & Allen, K.-A. (2020). The importance of teacher attitudes to inclusive education. In C. Boyle, J. Anderson, A. Page, & S. Mavropoulou (Eds.), *Inclusive education: Global issues and controversies* (pp. 127–146). Brill.
- Deviana, M., Umari, T., & Khadijah. (2023). Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 3463–3468.
- Hanımoğlu, E. (2018). The perceptions of students about the role of school counselors on career selection. *European Journal of Educational Research*, 7(4), 763–774. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.4.763>
- Insani, N., & Atuti, B. (2024). Peran konselor dalam membangun budaya inklusif dan aman di sekolah. *Jurnal Konseling Indonesia*, 9(2), 97–107.
- Irmayanti, R., & Yuliani, W. (2020). Peran bimbingan dan konseling di sekolah inklusif. *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus*, 16(2), 87–93. <https://doi.org/10.21831/jpk.v16i2.37011>

- Jibeen, T., & Khalid, R. (2010). Predictors of psychological well-being of Pakistani immigrants in Toronto, Canada. *International Journal of Intercultural Relations*, 34(5), 452–464. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2010.04.010>
- Mayes, R. D., Dollarhide, C. T., & Young, A. (2018). School counselors as leaders in school turnaround. *Journal of Organizational and Educational Leadership*, 4(1), 1–25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nelson, M. D., Dunbar, E. T., & Tarabochia, D. S. (2021). Individual counseling in schools: A process model for school counselors. *Journal of School Counseling*, 19(20), 1–35.
- Nidaurrohmah. (2025). Peran konselor sekolah dalam membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. *Bikoling: Jurnal Ilmu Bimbingan dan Konseling*, 2(1), 7–13.
- Purnamasari, Y., Wulandari, R., & Latif, I. (2024). Strategi guru bimbingan dan konseling dalam membangun lingkungan sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*, 376–384.
- Rahmi, A., Neviyarni, & Netrawati. (2022). Kompetensi multibudaya konselor dalam konseling kelompok sebagai upaya mengatasi bias budaya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.32505/syifaulqulub.v3i1.5012>
- Tere, M. I. (2021). Asesmen kebutuhan sebagai dasar perencanaan program bimbingan pribadi berbasis multikultural di SMA. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 5(1), 25–29. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v5i1.1069>
- Ummah, U. S., Tahar, M. M., & Hanafi, M. (2024). Driving factors of inclusive education for primary school in Indonesia. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(2), 86–93. <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.02.10> [Mohon dipastikan nama penulis pertama; entri pada naskah asal memuat nama yang rusak akibat penyalinan]
- Yildiz, N. G. (2021). An investigation of school counselors' role in building partnerships with linguistically diverse families. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 13(3), 2386–2415.
- Yuliawanti, R. (2021). Peran kolaboratif konselor di sekolah inklusif. *Jurnal Ide Guru*, 4(1), 68–74.
- Zulfa, I. S. E. (2021). Studi kode etik konseling multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), 65–77.